

PENGEMBANGAN ‘MARINE BUSINESS’ DI WILAYAH PESISIR TIMUR SUMATERA UTARA

Development of Marine Business in eastern coastal zone of North Sumatra Province

Muchtar Ahmad

STKPI Lubuk Pakam, Sumatera Utara

ABSTRACT

In developing of the eastern coastal zone in the North Sumatra province, emerged various ideas from rural coastal development in 1974, fishery metropolis in 2005, fishery industrialization until blue economy popularize as sustainable development in the fishery and marine businesses recently. However, at the national wise, the fisheries development is still dependent on productivity increasing, growth and investment policy. Although no evaluation on those ideas and policies implementation have been conducted and published. The issue of poverty, unbalance growth, inequality, and low capital investment together with environmental degradation in the coastal area have not yet shift to the due hope; even become down into worse situation. Therefore, base on economic geography the idea of development pattern called marine business system in the region is arranged. It is one of might be effective alternatives to address the issues in microeconomic sense. The idea is base on the assumption that the coastal area, indeed still open the opportunity to utilize for social wellbeing. Unfortunately it would not be persistence with the present strategy as ever. Developing marine business system need good governance together with best practices as moral hazard become worsen, so that the law enforcement is a must to be successful.

Keywords: marine business system, eastern coastal zone, good governance, best practices, blue economy,

ABSTRAK

Pengembangan kawasan pesisir timur Sumatera Utara muncul mulai dengan pembangunan desa pantai tahun 1974, minapolitan tahun 2005-an, industrialisasi sampai pada ‘blue economy’ yang dipopulerkan sebagai pembangunan berkelanjutan dalam bidang perikanan dan kelautan belakngan ini. Secara nasional, pola pembangunan perikanan bertumpu pada peningkatan produkti-vitas. pertumbuhan dan investasi. Namun belum ada ditemukan laporan hasil evaluasi atas dite-rapkannya gagasan dan kebijakan yang pernah diumumkan itu. Persoalan kemiskinan, pertum-buhan, pemerataan, penanaman modal dan degradasi lingkungan kawasan pesisir belum bergeser ke arah yang diharapkan bahkan terkesan keadaannya semakin menurun. Maka berdasarkan ekonomi geografi disusun gagasan pola pengembangan niaga kelautan (marine business) di wi-layah pantai timur Sumatera Utara, sebagai alternatif yang mungkin efektif bagi menjawab per-soalan pokok yang ada secara mikro-ekonomi. Dengan anggapan bahwa kawasan pesisir sebe-narnya masih membuka peluang untuk didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi tidak bisa wujud dengan strategi yang biasa dilakukan selama ini. Pengembangan sistem niaga laut dan pengurusan (governance) yang baik dengan praktek terbaik serta menindak moral hazard yang semakin buruk, adalah suatu keniscayaan bagi keberhasilannya.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Kebijakan, Marine-Business System, Pengurusan Yang Baik, Praktek Baik.

PENDAHUUAN

Telah banyak digagas kebijakan dan pola pembangunan kawasan pantai timur Sumatera Utara. Dari pembangunan desa pantai pada

tahun 1974 sampai sekarang ini diperkenalkan pula Minapolitan pada tahun 2000-an. Secara nasional dari pembangunan perikanan yang bertumpu pada produktivitas dan investasi

sampai belakangan ini pada ‘blue economy’ yang dipopulerkan sebagai pembangunan berkelanjutan dalam bidang perikanan dan kelautan. Namun hampir tidak ada muncul pembahasan bagai mana gagasan itu diterapkan dan tidak pula ada laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan gagasan itu. Jika dicermati pendekatan yang dilakukan adalah amat beragam secara teoritis dasarnya. Namun dasarnya tak berbeda yaitu kapitalistis dan neoliberalis.

Hal itu tergambar dari dasar pemikiran (concept), yang terjadi pada perubahan dan modifikasi yang berkesan tanpa alasan atau tanpa hasil penilaian dan pertimbangan yang dalam. Secara sederhana perkembangan gagasan dan kebijakan pembangunan kawasan pesisir, pantai dan lautan dapat dilukiskan seperti rangkaian di bawah ini:



Pada awalnya ada pendekatan ruang (spasial) berdasarkan ekonomi geografi dan ekonomi mikro seperti pada gagasan pembangunan desa pantai, system ‘aquabusiness’ dan minapolitan. Kemudian bergeser kepada ancangan makro ekonomi berorientasi pertumbuhan dengan pene-kanan kepada peningkatan produksi dan ekspor hasil perikanan pada masa orde baru dan Industrialisasi perikanan pada era reformasi. Diikuti berikutnya oleh ancangan ekosistem dan ‘blue economy’ (ekonomi biru) yang dipandang berorientasi pembangunan berkelanjutan. Tak mudah menemukan alasan kenapa alur perkembangan pendekatan an kebijakan terjadi seperti itu. Selain dari perkiraan perubahan kelembagaan atau menteri, yang merasa harus menjabat dengan gagas-an baru, asal ‘tampil beda’ kebijakan atau ada tawaran gagasan baru dari negara lain seperti hal-nya pembangunan berkelanjutan dan ‘blue economy’.

Sebab tanpa alasan dan penjelasan kenapa suatu kebijakan berubah? Perubahan dilakukan tanpa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya atau pantauan terhadap yang sedang dilaksanakan. Bagaimanakah capaian kebijakan sebelumnya? Adakah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan? Atau kalau gagal apakah penyebabnya? Sehingga

perlu dilakukan perubahan kebi-jakan atau telah menimbulkan gagasan yang lebih meyakinkan. Jalan keluar dari keadaan se-karang suatu keniscayaan bila hendak memajukan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat pesisir yang serba ketinggalan dan terbiarkan.

Sebenarnya keadaan dan suasana lingkungan industri dan usaha perikanan menunjukkan perlu dikelola secara strategis (strategic management) dengan ancangan yang holistik. Untuk itu diperlukan pendekatan masa depan yang visioner ketimbang memecahkan masalah sesaat. Sebab tidak jarang masalah itu memang tidak dapat diatasi lagi atau boleh saja hilang nanti dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin saja disebabkan strategi yang dijalankan mangkus dan sangkil mencapai tujuan atau sasaran, sebagai penjabaran gambaran masa depan yang hendak diwujudkan.

Oleh karena itu makalah ini menggunakan ancangan pengelolaan strategis dalam meru-muskan pola pengembangan niaga kelautan (marine business) di wilayah pantai timur Sumatra Utara. Pertimbangan ekosistem, industrialisasi perikanan dan ekonomi biru dalam pendekatan ruang berdasarkan ekonomi geografi diterapkan secara teleologis pada sistem niaga kelautan itu.

METODE PENELITIAN

Persoalan pokok (issues) di kawasan pesisir adalah kemiskinan, pertumbuhan, pemerataan, penanaman modal dan degradasi lingkungan. Keadaan itu belum bergeser ke arah yang diharap-kan, bahkan justru terkesan menurun. Makalah ini menggunakan ancangan pengelolaan secara strategis dalam menyusun pola pengembangan niaga kelautan (marine business) di wilayah pesi-sir timur Sumatra Utara berdasarkan geografi ekonomi dan pembangunan wilayah. Niaga kelaut-an adalah suatu usaha ekonomi yang mendayagunakan sumberdaya hayati dan lingkungan laut secara sangkil dan lestari. Ia merupakan suatu sistem, sebagai rangkaian rantai niaga (business system) mulai dari hulu penyediaan sarana produksi sampai ke hilir menyampaikan barang dan jasa kepada para pengguna hasil laut yang dikeluarkan.

Data dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan data sekunder berdasarkan kajian

dan pengamatan wilayah pesisir sejak tahun 2006 di kabupaten Langkat, Deli-Serdang, Serdang Bedagai, Asahan dan kabupaten Batubara (Nurmatias 2013). Kemudian dilakukan meta analisis dalam menyusun sistem dengan merujuk system agribisnis baru yang berpatokan pada pemba-ngunan yang berkelanjutan selaras dengan lingkungan dan sumber kelautan di kawasan pesisir tersebut, tetapi dengan penekanan kepada sasaran perubahan susunan ekonomi dan tenaga kerja serta terkait dengan masalah kronis kawasan pesisir yakni kemiskinan dan pengangguran. Sementara perkembangan kebijakan mutakhir terkait potensi kelautan dan perikanan, industri-lisasi perikanan dan ekonomi biru dipertimbangkan dengan seksama.

Tujuannya adalah menemukan suatu system niaga kelautan yang bertumpu pada pengem-bangan wilayah pesisir secara berkelanjutan dengan sasaran utama pada kesejahteraan masya-rakat tempatan, perubahan susunan ekonomi dan ketenagakerjaan, dan menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, ketidak-merataan, pertumbuhan, dan menarik investasi yang menca-irkan suasana perkembangan wilayah pesisir yang terkesan berhenti. Hal itu hendak diatasi melalui pengembangan sistem niaga kelautan dan perikananannya. Oleh karena itu aspek ekonomi saling dipersilangkan dengan aspek sosial dan lingkungan dalam lingkup mikro-ekonomi serta mana-jemen dan governance serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari moral hazard dan rasuah.

Potensi Sumber Kaya dan Rakyat Miskin

Sebenarnya dengan melakukan bangun-ulang (rebuilding) perikanan global akan membuatnya lima kali lebih bernilai sementara ekologi maju membaik, berdasarkan hasil kajian baru dari Universitys British Columbia. Caranya dengan mengurangi jumlah armada penang-kapan ikan global, menghapuskan subsidi pemerintah yang merusak, dan menggantikannya dengan system pengelolaan yang mangkus. Hasilnya perikanan global akan bernilai US\$54 milyar setiap tahun, daripada kehilangan US 13 milyar per tahun. Dewasa ini perikanan global belum diberdayakan sampai ke potensi ekonominya. Sebagian disebabkan pemerintah negara berkenaan membuat mereka mengapung oleh subsidi yang diberikan kepada

armada penangka-pan ikan skala besar yang tidak menguntungkan dari uang pembayar pajak (Sumaila U Rashid *et al.* 2010).

Menurut laporan Food Agricultural Organization PBB (FAO-UN) bahwa pada tahun 2012 produksi ikan dunia dari usaha penangkapan di laut maupun di perairan umum cenderung tetap dalam lima tahun terakhir ini. Yaitu dari 90 juta ton pada tahun 2006 menjadi 90,4 juta ton pada tahun 2011. Sementara produksi ikan dari kegiatan budidaya mengalami peningkatan cukup pesat dari 47,3 juta ton menjadi 63,6 juta ton pada periode yang sama.

Sedangkan potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia sekitar 6,5 juta ton/tahun dengan tingkat pemanfaatan 77,4% atau 5,03 juta ton pada tahun 2011. Dengan keadaan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut tersebut seperti itu, beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) seperti Laut Jawa dan Selat Melaka, telah terjadi kelebihan tangkap (over fishing). Sementara di perairan lainnya seperti Laut Cina Selatan, Arafura dan lain sebagainya, masih ada potensi sumber ikannya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Potensi perikanan budidaya payau atau tambak mencapai 2,96 juta hektar dan baru dimanfaatkan seluas 682.857 hektar 23 % serta potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar dengan tingkat pemanfaatan yang relatif masih rendah, yaitu sekitar 117.649 hektar atau 1%. Potensi perikanan budidaya ini akan semakin besar, apabila kita memasukan potensi budidaya air tawar seperti kolam 541.100 ha, budidaya di perairan umum 158.125 ha dan mina-padi seluas 1,54 juta ha. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan produksi perikanan tangkap. Sementara pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan pada tahun 2012 mencapai angka 6,5%, dengan nilai nominal sebesar Rp 57,69 triliun.

Sedangkan ekspor hasil perikanan telah mengarah pada keluaran bernilai tambah, dengan pertumbuhan pada periode 2011–2012 sebesar 11,6%. Nilai impor pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 15,4%. Dengan demikian, neraca perdagangan perikanan pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar US\$ 3,52 miliar.

Dengan panjang garis pantainya 95.200 km dan 13.478 pulau Nilai ekonomi kawasan pesisir dan laut Indonesia diperkirakan sekitar US\$ 1.200 triliun dengan jumlah luasan perairan 5,88 juta kilometer persegi. Tahun 2012, sektor ekonomi pesisir dan laut yang terdiri dari perikanan tangkap, budidaya perikanan, sumberdaya energi dan mineral, pariwisata laut, transportasi dan industri maritim dan jasa semuanya menyumbang sekitar 30 persen terhadap GDP dan mempekerjakan lebih dari 20 juta orang (Dahuri, 2013). Dalam hal perniagaan dan ekonomi, sumbangan industri perikanan masih rendah. Misalnya pada tahun 2011 ekspor ikan hanya mencapai US\$ 3,34 milyar. Nilai ekspor tahun 2012 diperkirakan meningkat mencapai US\$ 5 milyar dengan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya 12 juta ton.

Pola pembangunan ekonomi kita umumnya didasarkan kepada kapitalisme aliran neo-liberalisme sejak mulai rezim Orde Baru. Pada kenyataannya pola itu tidak mampu mengatasi kemiskinan kronis masyarakat di kawasan pesisir. Lebih lanjut berangkat dengan suatu pergeseran paradigma pembangunan, dari menjalankan pertumbuhan ekonomi semata ke pembangunan yang mengikutsertakan miskin dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sampai saat ini sekitar separuh nelayan yang bermukim di kawasan pesisir tetap miskin. Hanya segelintir saja yang terangkat di kalangan masyarakat tempatan. Sebagai akibatnya, rentang jarak antara kaya dan miskin telah semakin jauh selama delapan tahun terakhir. Hal ini tercermin dari meningkatnya Koefisien Gini dari 0,34 pada tahun 2004 menjadi 0,40 tahun 2012.

Jadi sumbangan dari yang dapat dihitung dan dinyatakan dalam angka seperti di atas, itu hanya satu dari ukuran nilai pesisir dan lautan. Sementara yang langsung memberikan makna bagi kehidupan manusia sendiri, seperti ekosistem pesisir dan laut, juga memberikan sumbangan bermakna bagi kemakmuran bangsa dan mutu hidup secara keseluruhan. Misalnya keberhasilan budidaya laut dan pesisir, seperti tambak, keramba, dan budidaya dalam, yang memberikan suatu kesenangan hidup tersendiri, yang tak terukur dalam bentuk angka. Bahkan masih banyak hal yang lebih penting yang nilainya tak dapat ditetapkan, seperti jasa ekosistem, fungsi pendukung

kehidupan, warisan budaya serta nilai keindahan estetis pesisir dan lautan yang secara intrinsik mempunyai tenaga yang membuat manusia santai, segar dan memberikan inspirasi.

Belum lagi sumber dan lingkungan yang amat sedikit tersentuh seperti sumberdaya energi gelombang, angin dan cahaya matahari; plankton, ikan laut dalam dan gas bumi semuanya potensial menyejahterakan kehidupan masyarakat. Diperkirakan 45 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan dunia, diangkut melalui perairan Indonesia. Toko dan kedai kebutuhan sehari-hari banyak diisi dengan makanan dari laut. Pelabuhan penuh sesak penumpang feri dan barang hasil laut diangkut dengan pengangkutan muatan laut (cargo).

Sungguhpun Indonesia adalah negara penghasil ikan urutan ke 13 di dunia, tetapi tingkat konsumsi ikan dalam negeri masih jauh di bawah negara ASEAN lainnya. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan bahwa konsumsi ikan rendah di Indonesia. Antara lain kurang pengetahuan dan kesadaran gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Juga rendahnya persediaan ikan untuk memenuhi permintaan, sehingga bahkan Indonesia impor ikan. Terutama di kawasan perdesaan kurangnya persediaan lebih disebabkan oleh kesulitan penyebaran ke kawasan itu. Lebih jauh, terbatasnya penggunaan teknologi pengolahan dan pembekuan ikan, maupun penyebaran hasil olahan itu penyebab rendahnya konsumsi ikan di Indonesia.

Keadaan itu juga mencerminkan suasana keberhasilan industrialisasi dan belum mantapnya sistem niaga kelautan (marine business system) atau sistem aquabisnis sebagai cerminan kegagalan dari kebijakan pembangunan agribisnis perikanan di masa awal reformasi. Sungguhpun demikian, pentingnya arti kawasan pesisir dan laut bukanlah hal yang dilebih-lebihkan. Karena sudah sejak waktu yang lama keberadaannya telah memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, bukan saja mereka yang secara langsung telah memanfaatkannya.

Namun sayangnya pemanfaatan pesisir dan lautan serta sumber dan lingkungannya bukanlah tanpa biaya. Kenyataannya ada akibat yang harus ditanggung yaitu balas-balik dari kegiatan kerusakan lingkungan. Sebagian besar sumber ikan di perairan laut sudah mencapai

tingkat penggarapan penuh atau bahkan kelebihan tangkap (*overfishing*). Hal ini terutama berlaku di perairan yang padat dengan nelayan penangkap ikan termasuk di Selat Melaka. Juga di perairan dimana praktek pencurian ikan (*illegal fishing*), tidak diatur dan tidak dilaporkan oleh para nelayan asing, termasuk di perairan Natuna maupun Selat Melaka serta kawasan ekonomi eksklusif.

Sungguhpun dalam keadaan demikian, sektor kelautan tidak mendapatkan cukup perhatian dari para penanam modal. Pada hal Indonesia harus mengembangkan sumberdaya kelautannya melalui penanaman modal yang terpadu. Sebab persoalan pokok yang dihadapi mempunyai spectrum yang luas. Secara vertikal, sektor kelautan dan perikanan menghadapi masalah penanaman modal dalam kompetensi penangkapan ikan, gudang pendingin dan pembekuan, maupun masalah distribusi seperti kemasan (*packaging*), pengangkutan dan mutu untuk memasarkannya.

Oleh sebab itu untuk mengatasi keadaan ini dan meningkatkan kemangkusan kebijakan pemerintah perlu lebih memperhatikan kebutuhan di lapangan, teristimewa bagi nelayan. Misalnya menyediakan gudang pendingin dan bahan bakar di sekitar kawasan mereka karena kekurangan hal itu sering terjadi. Pemerintah juga merancang upaya besar dalam meningkatkan nilai tambah hasil laut, termasuk dengan menyediakan infrastruktur untuk menarik penanam modal.

Dengan demikian itu, maka manfaat kegiatan sector ekonomi pesisir dan kelautan, teristimewa minyak dan gas, sebagian besar pertambangan dan wisata bahai serta industri maritim umumnya telah dinikmati oleh perusahaan besar dari dalam maupun luar negeri. Pada akhirnya hal itu merupakan pertanda bahwa wilayah pesisir dan laut kita berada dalam keadaan salah-urus dan masyarakatnya terkebelakangan. Oleh karena itu perubahan yang mendasar sangat mendesak dalam cara mendayagukannya, mengembangkan dan mengelola wilayah tersebut. Dengan kata lain, mulai sekarang ke depan haruslah terjamin penggunaan yang mangkus pesisir dan laut serta sumberdaya yang dikandungnya untuk kesejahteraan penduduk tempatan dalam rangka menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pada waktu yang

sama menjamin keberlanjutan lingkungan dan pemerataan social di kawasan pesisir dan lautan.

Keadaan sumber, lingkungan dan ekonomi kawasan pesisir timur Sumatra Utara juga men-cerminkan gambaran umum Indonesia di atas. Hanya saja dalam skala kecil, setara dengan panjang garis pantai, luas perairan, dan kedudukannya di Selat Melaka, yang telah sejak lama digarap. Bahkan dalam hal tertentu lebih kurang beruntung atau agak parah keadaannya seperti dalam hal sumberdaya perairan, kerusakan lingkungan, dan meningkatnya konflik social dalam merebutkan sumber dan lingkungan perairan. Hal itu terjadi karena pengelolaan dan pengurusan kawasan pesisir yang terabaikan atau jika ada kebijakan dan strateginya ternyata tidak mangkus dan sangkil memecahkan masalah yang ada. Hampir tiada pembaharuan dan perubahan yang berarti dalam struktur ekonomi, system niaga, dan perkembangan teknologi di kalangan usaha penangkapan skala kecil, pada 30 tahun belakangan ini. Oleh karena itu, suatu strategi dan kebijakan yang berubah dan berbeda dengan sebelumnya adalah suatu keniscayaan.

Masalah dan pokok persoalan (*issues*) ekonomi pesisir: kemiskinan, pemerataan, pertumbuhan, permodalan dan penanaman modal, serta menurunnya keadaan sumber dan lingkungan yang sudah menggejala sejak tahun 1970-an belum bergeser. Paradigma perkembangan kebijakannya dan praktek pengurusannya juga tidak bermakna mengatasi keadaan. Mulai dengan gagasan pembangunan desa pantai dan desa nelayan di Tubun dan Belawan, orientasi pertumbuhan produktivitas dengan membagikan alat tangkap dan kapal ada menyintuh kawasan pesisir.

Namun tidak memberi kesan yang berarti pada perubahan keadaan yang menyeluruh apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1960-an misalnya. Apalagi tentang gagasan dan kebijakan agribisnis perikanan – yang lebih tepat disebut aquabisnis – dan minapolitan yang amat kabur pelaksanaannya, sehingga hampir tidak berbekas sama sekali di kawasan pesisir timur Sumatera khususnya. Penyebab utamanya ialah 'incompetency' dan 'moral hazard'. Belakangan sekali didengungkan industrialisasi perikanan, yang belum sempat dilaksanakan, karena menteri yang menggagasnya diberhentikan. Menteri Kelautan dan Perikanan baru, sekarang sibuk mengkampanyekan

ekonomi biru (blue economy), sembari mengeluarkan pernyataan bahwa KKP mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan. Sungguhpun demikian, dapat dimaklumi ma-nakah yang akan diprioritaskan ‘dukungan’ antara kedua gagasan dan kebijakan (industrialisasi atau ekonomi biru), ketika sama-sama dijalankan.

“Blue economy” dan Pembangunan Berkelanjutan

Pengagas pertama "The Blue Economy" adalah Prof. Gunther Pauli (2010) yang menyatakan bahwa istilah itu adalah suatu sistem social yang tercipta melalui proses bertahap selangkah demi selangkah. Penamaan istilah itu diambil dari keelokan Bunda Bumi, yang langit dan lautnya biru, selama tidak ada pencemaran. Karena itu disarankan menggunakan sebutan sistem social itu dengan “The Blue Economy” diciptakan melalui suatu proses keberlanjutan yang sebenarnya. Dengan ditolong oleh 25 anggota stafnya, beliau telah menghabiskan waktu tiga tahun mencari dan menganalisis sekitar 2.200 teknologi inovatif berkaitan dengan istilah baru itu.

Ekonomi biru (blue economy) merupakan persoalan pokok yang dikemukakan pada Expo 2012 di Yeosu, Korea Selatan, yang bertepatan “The Living Ocean and Coast” (Lautan dan Pesisir yang Hidup) dari 12 Mei sampai 12 Agustus 2012. Ekonomi biru menghubungkan aspek laut dan pesisir dalam pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan.

Bagi Indonesia, satu di antara strategi untuk meningkatkan sumbangan dari sektor ekonomi perikanan dan kelautan adalah ekonomi biru itu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri KKP (2011) bahwa dasar pemikiran pembangunan nasional adalah keniscayaan suatu bangsa maritim dapat memadukan pembangunan berbasis daratan dan laut yang berkesinambungan demi kepentingan kemakmuran rakyat. Ekonomi biru merupakan suatu model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. Paradigma ekonomi biru mengajak kita belajar dari alam dan menggunakan logika ekosistem di dalam menjalankan pembangunan. Untuk itu, penerapan konsep ekonomi biru

membutuhkan dukungan pengetahuan dan teknologi. Implementasinya di sektor kelautan dan perikanan membutuhkan inovasi ‘cutting-edge’ yang tidak hanya mampu memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi lebih konkrit inovasi sistem produksi bersih tanpa limbah.

Ekonomi biru mendambakan peran usahawan atau penanam modal. Lembaga penelitian dan teknologi harus dekat dengan dunia usaha. Hasil kajian dan pengembangan harus benar-benar terbukti memadai kinerjanya. Kerjasama dan pepaduan penelitian, lembaga pendidikan dan penelitian, pemerintah dan swasta adalah kunci dalam implementasi ekonomi biru. Universitas dengan tridharmanya, yang memiliki kepakaran dalam penelitian dan pengembangan teknologi tentu menyambut baik tantangan ini. Karena ekonomi biru diyakini adalah masa depan perikanan dan kelautan, menurut menteri KKP Sharif C. Sutardjo (2013).

Konsep ekonomi biru memang bukan identik dengan ekonomi kelautan atau *ocean-based economy*. Namun prinsip dasarnya dapat diterapkan di sektor kelautan dan perikanan, terutama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan tidak merusak lingkungan, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ekonomi biru (blue economy) juga bukan ekonomi hijau (green economy) yang diterapkan di sektor kelautan dan perikanan. Karena ada beberapa prinsip yang tidak begitu pas dengan karakteristik sektor kelautan dan perikanan. Ekonomi biru pada akhirnya akan menjamin bahwa suatu pembangunan yang dijalankan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjamin terjadinya keberlanjutan lingkungan dan sumberdayanya.

Penerapan konsep ekonomi Biru dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu terus dikaji dan disempurnakan. Pendekatan ekonomi biru dikembangkan untuk mendorong peningkatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi pro lingkungan melalui pengembangan bisnis dan investasi inovatif dan kreatif. Tujuannya tidak lain menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang semakin luas dan pendapatan masyarakat meningkat, namun langit dan laut

tetap biru. Dalam kaitan ini, kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sedang diarahkan untuk mendorong agar para pelaku pembangunan, terutama bis-nis dan investor dapat mengembangkan usahanya dengan prinsip efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait, sehingga menghasilkan penerimaan yang lebih besar.

Pendapatan dari produk turunan, diharapkan dapat memberikan hasil jauh lebih besar dari produk awal. Prinsip lainnya, adalah inovasi dan kreativitas dalam berbisnis, termasuk di dalamnya diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi, rekayasa keuangan (financial engineering), dan menciptakan pasar baru bagi produk yang dihasilkan. Selain itu, yang penting adalah perubahan secara dramatis cara berbisnis, yaitu dengan cara berpikir out of the box. Beberapa contoh penerapan konsep blue economy, dengan memanfaatkan potensi bebe-rapa komoditas hasil laut, antara lain ikan segar dapat menghasilkan ikan kaleng, beku, tepung ikan, minyak ikan, makanan ternak, kulit samak, gelatin, dan kerajinan. Dari produk tersebut dapat dihasilkan produk turunan paling tidak enam jenis. Udang dapat menghasilkan daging udang dan limbah udang sebagai bahan baku. Limbah udang diproses menjadi khitin dan chito-san. Sementara khitin menghasilkan berbagai produk seperti: bahan untuk fotografi, kertas, far-masi, kosmetik, pengolahan dan pengawetan kayu, dan lain sebagainya.

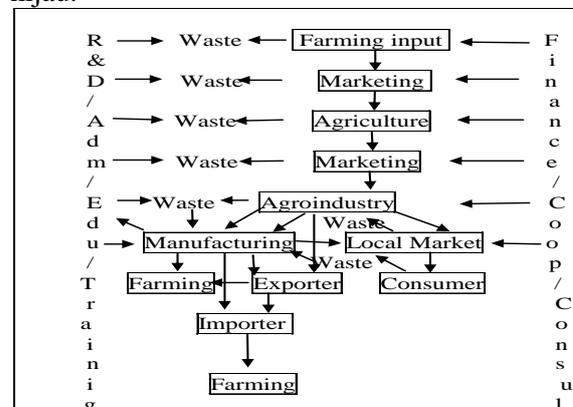
Dengan menerapkan 'the blue economy', memungkinkan Indonesia memberdayakan pem-bangunan wilayah pesisir dan kelautan mencapai masalah kronis pengangguran dan kemiskinan, serta juga akan memberkan sumbangan yang bermakna untuk mewujudkan suatu Indonesia yang maju dan makmur menjelang 2025. Pernyataan itu juga memberi pertanda bahwa kebijakan se-lama ini menghadapi masalah yang sama, namun tidak berhasil memberikan penyelesaian de-ngan kebijaksanaan yang dicanangkan, termasuk strategi agribisnis perikanan. Jika demikian halnya, maka karena 'the blue economy' pada dasarnya berlandaskan ideology yang kapitalistis dengan corak neoliberalisme yang bersifat makro, maka tanpa perubahan mendasar, terutama dalam strategi dan

kebijakan penerapannya yang bertumpu pada swasta dan investasinya yang termasuk dalam lingkup ekonomi mikro, maka agaknya diperlukan suatu model niaga kelautan yang disebut Sistem Maribisnis atau *Marine Business System*.

Sistem Aquabisnis Dalam "The Blue Economy"

Karena prinsip berkelanjutan yang diterapkan harus mengandung prinsip keterpaduan aspek keuntungan ekonomi dengan efisien, partisipasi sosial dalam tetesan keuntungan kepada masyarakat sekitar, dan pencagaran lingkungan, sedangkan penyelenggaraannya oleh swasta dan investasi mereka, maka dapat dipandang bahwa pada tingkat pelaksanaan lebih dekat kepada ekonomi mikro yang bersifat niaga (business). Maka pengembangan sistem mari-bisnis (Marine Business System) agaknya akan lebih mungkin dalam pemecahan masalah dan persoalan strategis yang kronis di wilayah pesisir Sumatera Utara.

Konsep system maribisnis itu dapat dikembangkan dengan merujuk kepada system agribis-nis baru yang bercirikanhaskan berkelanjutan, seperti yang dikemukakan Ahmad (2005). Maka gambaran suatu sistem agribisnis yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan itu ialah seperti pada Rajah 1 di bawah ini. Aspek lingkungan terkandung dalam setiap subsistem dengan kegiatan niaga kelautan dengan prinsip mendayagunakan limbah (*green economy*), yang berasal dari masing-masing subsistem itu, sehingga merupakan suatu kegiatan yang dikenal dengan sebutan ekonomi hijau.



Gambar 1. Functional Sustainable Mari-business System (Ahmad 2010).

Oleh karena itu, tantangan saat ini adalah mengeratkan keterkaitan antara subsistem dan membina kelembagaan pada sistem maribisnis melalui pendekatan didasarkan kepada sumber (Resource-Based View). Hal ini dapat dilakukan bila difahami dengan baik keberadaan subsistem, peran dan potensi maupun tingkat keterkaitannya saat ini. Peluang peran dan keterkaitan antara kebijakan umum nasional dan strategi lokal perlu dikaji untuk membangun daya saing dan keberlanjutan suatu sistem maribisnis nasional.

Sasaran utamanya ialah untuk mencapai suatu keterpaduan dan gabungan dengan tindakan pelbagai pemangku kepentingan (stakeholders), seperti perusahaan, pusat kajian, masyarakat konsumen, pemerintah dan lembaga penelitian secara umumnya. Hakikatnya suatu kerangka kerja yang melembaga perlu mengoordinasi system maribisnis dalam suatu strategi nasional (Wilk dan Fensterseifer 2003), paling tidak pada tingkat daerah otonom. Di Thailand system agribisnis yang dikembangkan dengan pendekatan sumber seperti yang terlihat pada komoditas khas tertentu seperti karet alam, yang sebagian besar produksinya berasal dari perkebunan rakyat skala kecil (Ahmad 2010) ternyata berhasil mewujudkan pembangunan karet alam yang berkelanjutan dengan pertumbuhan yang nyata, sampai mengalahkan Indonesia maupun Malaysia.

Oleh sebab itu, gagasan system maribisnis berkelanjutan, sepatutnya dipertimbangkan untuk dikembangkan di kalangan usaha perikanan dan kelautan di kawasan pesisir sebagai alternative dari kebijakan yang dilaksanakan selama ini yang belum berhasil. Apalagi dalam prinsipnya gagasan ini sama sekali tidak bertentangan dengan pemerintahan kecuali keharusan intervensi, dan penyelenggaraan pembangunan perikanan dan kelautan dengan pengurusan yang baik (good governance) dan melakukan praktek yang terbaik (best practices). Hal yang hanya mungkin terwujud manakala 'moral hazard' yang parah dihapuskan atau ditindak tegas.

Tentang hal yang disebut terakhir itu, sudah banyak kalangan yang memperingatkannya. Terma-suk dari pencipta istilah dan teori ekonomi biru sendiri. Beliau menyatakan bahwa disebabkan sifat alamiah implementasi keusahawanan swasta yang

motivasiya memaksimalkan keuntungan, maka kecil kemungkinan mereka tidak akan memberikan sumbangan berarti bagi mengurangi kemiskinan. Walaupun tetap ada harapan terbukanya kesempatan kerja baru. Juga dicurigai bahwa terdapat suatu resiko tinggi bagi sebagian komunitas akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang mungkin diperkirakan sebagai beban sangat berat bilamana persetujuan lisensi keuangan dan lain-lain hak kekayaan intelektual (HAKI); jadi hanya akan memelihara hierarchi kekayaan yang berlaku sampai sekarang.

Pendekatan Aquabisnis (Marine Business)

Pendekatan Pembangunan Perikanan pada PJP I dianggap kurang berhasil melalui pendekatan produksi dalam rangka peningkatan taraf hidup nelayan dan petani ikan (Boedi Soesilo 1998) Oleh karena itu pada PJP II dilaksanakan melalui pendekatan agribisnis. Sistem agribisnis terdiri dari subsisten penyediaan sarana pertanian (farm supplies); usaha tani sebagai subsistem produksi; dan pengolahan & pemasaran sebagai subsistem pasca panen dan pemasaran. Menurut Abdul Malik (1998) melalui pendekatan system agribisnis itu dimaksudkan agar petani nelayan tidak hanya melakukan kegiatan dan memperoleh pendapatan dari subsistem produksi saja, tetapi dari setiap subsistem diharapkan dapat memperoleh pendapatan juga.

Untuk mencapai sasaran pembangunan perikanan itu ditempuh cara pendekatan system agribisnis berpola kemitraan dan berwawasan lingkungan. Keempat subsistem agribisnis tersebut hadir secara terpadu dalam suatu wilayah pengembalan sejalan dengan penerapan pola kemitraan dan meningkatkan koperasi sebagai lembaga ekonomi pedesaan.

Ciri pembangunan perikanan yang berbudaya industry itu antara lain mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa. Sedangkan efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam mengalokasikan sumberdaya yang dapat menjamin penghematan dalam penggunaan sumberdaya itu. Dengan demikian misi yang diemban pembangunan perikanan adalah di antaranya: meningkatkan efisiensi produk perikanan dengan memantapkan system pendukung. Sasaran pembangunan perikanan antara lain peningkatan produktivitas dan

efisiensi seluruh mata rantai system agribisnis mulai dari subsistem produksi, pengolahan (agroindustri) samai ke pemasaran dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan menghadapi globalisasi dan semakin terbukanya perekonomian nasional. Sementara tujuan pembangunan perikanan secara umum antara lain mengembangkan usaha perikanan secara terpadu, produktif dan efisien.

Kebijakan yang berkenaan dilaksanakan ialah pengembangan kelembagaan agribisnis. Agenda pembangunan perikanan yang berkaitan satu di antara enam yang ditetapkan ialah: Penataan pengembangan struktur dan kelembagaan sistem agribisnis perikanan yang mampu mengakomodir upaya pencapaian tujuan keunggulan daya saing. Penyeimbangan struktur hulu-hilir, pengembangan dan penataan tpm sistem yang kondusif untuk pencapaian daya saing, pengembangan asosiasi aquabisnis vertikal dan pengembangan strategi aliansi aquabisnis perikanan, baik pada kegiatan produksi maupun pemasaran. Juga dilaksanakan pengembangan organisasi bisnis nelayan berupa koperasi agribisnis perikanan. Sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan petani nelayan kecil dalam merebut nilai tambah yang ada pada agribisnis perikanan, sehingga pendapatan real petani nelayan dapat ditingkatkan.

Demikian pula, program percepatan industrialisasi perikanan terpadu hulu sampai hilir sangat dibutuhkan peran dan dukungan dari pemangku kepentingan. Di antaranya, institusi permodalan terutama perbankan, kemitraan usaha dan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Sungguhpun dukungan terhadap konsep *blue economy* cukup kuat, namun diyakini bahwa penyederhanaan birokrasi pemerintah dan penghapusan korupsi dalam badan pemerintah akan jauh merupakan langkah lebih penting, ketika menuju arah pembangunan ekonomi dan lingkungan secara umum. Oleh sebab korupsi pada tingkat tinggi yang berlebihan saat ini di Indonesia, maka dicurigai bahwa justru keikut-sertaan pejabat tinggi pemerintah atau intervensi dalam implementasi konsep *blue economy*, akan merupakan suatu faktor utama yang dapat memberikan andil besar bagi kegagalannya.

KESIMPULAN

Masalah kronis pengangguran dan kemiskinan, serta wilayah pesisir yang sejahtera belum berhasil diatasi oleh strategi kebijakan yang selama ini diterapkan. Baik pembangunan desa pantai, pengembangan agribisnis perikanan, minapolitan, industrialisasi perikanan, dan karena itu diperkenalkan pula belakangan ini 'the blue economy' (ekonomi biru).

Pendekatan ekonomi biru dikembangkan untuk mendorong peningkatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi pro-lingkungan melalui pengembangan bisnis dan investasi inovatif dan kreatif, yang lebih bersifat mikro-ekonomi. Tujuannya adalah menghasilkan peningkatan per-tumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang semakin luas, dan pendapatan masyarakat meningkat dalam suatu lingkungan yang terpelihara. Dasar ideologinya kapitalisme dan system ekonomi neoliberalisme, dengan kebijakan yang tentu saja bersifat makro-ekonomi.

Karena dilakukan harus melalui keterpaduan aspek keuntungan ekonomi, partisipasi social, dan pencagaran lingkungan oleh swasta dan investasi mereka, maka dapat dipandang bahwa pa-da tingkat pelaksanaan lebih dekat kepada ekonomi mikro yang bersifat niaga (business). Maka pengembangan sistem mari-bisnis (Marine Business System) agaknya akan lebih mungkin dalam pemecahan masalah dan persoalan strategis yang kronis di wilayah pesisir Sumatera Utara. Ancangannya seyogyanya melalui kawasan dan sumberdaya, dengan komodity khas yang diunggulkan Namun tetap menuntut hadirnya suatu pemerintah yang bersih, pengurusan yang baik dan penelenggaraan administrasi terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Burhanuddin 1998. Prospek Pembangunan Perikanan di Daerah Riau; dalam Strategi Pembangunan Perikanan dan Klautan Nasional Dalam Meningkatkan Devisa Negara. Unri Press, Pekanbaru. 158 – 185.
- Ahmad, M. 2012. Tantangan dan Hambatan Industrialisasi Perikanan di Indonesia. Makalah yang disampaikan pada *Seminar Pengembangan Industri Perikanan dan*

- Sistem Aquabisnis: Peluang dan Tantangan* di Bank Indonesia Medan, 12 Juli 2012.
- Ahmad, M. 2010. A New Sustainable Agribusiness System with Ecological Economic Guidance, *Jour. Agribusiness System* 1(2):79 – 94.
- Ahmad, M. 2009. Sistem Agribisnis Karet Alam di Thailand. *Sistem Agribisnis* I(1): 1 – 10.
- Ahmad, M. 2008. Kebijakan Industrialisasi Perikanan di Indonesia, *Jurnal Perikanan Terubuk* 36 (1):42 – 53.
- Dahuri, R. 2012, Blue economy for sustainable coastal development, *Jakarta Post*, 14 Agustus
- Darus, Baharuddin dan Meneth Ginting. 1997. *Konsepsi dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Pantai Medan*. USU Press. Medan.
- Darus, B. dan M. Ginting 1980, Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Pantai, *Konpernas PERHEPI ke VI*, Medan
- Darus, Bahauddin 1974, The Role of Artisanal Fisheries in the Strategy of Coastal Area Development in the Povice of Noth Sumatera. *Workshop on Artisanal Fisheries Development*, Jakarta.
- Izzudin 2013. Empat investor incar industri rumput laut, *Antara* Senin, 22 April 2013
- Izzudin 2013. Industrialisasi udang serap 400 ribu tenaga kerja. *Antara* Jum'at, 12 April 2013
- Izuddin 2013. KKP dorong percepatan industrialisasi perikanan. *Antara* Minggu, 7 April 2013.
- Numatias 2013. *Pembangunan Berkelanjutan Kawasan Pesisir di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara*. Disertasi Doktor pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. (Tidak diterbitkan).
- Pauli, Gunther (2010), Grand Hyatt Tokyo on 8 November 2010.
- Rashid, S. U. Cheung W, Dyck A, Gueye K, Huang L, et al. 2010. Benefits of Rebuilding Global Marine Fisheries Outweigh Costs. *PLoS ONE*, 2012 DOI: 10.1371/journal.pone.0040542
- Sirojuzilam, 2011. *Problema Wilayah Kota dan Daerahk* USU Press, Medan.
- Soesilo, Boedi 1998. Makalah yang disampaikan pada Pertemuan Pemantapan Program dan Proyek Tahun Anggaran 1998/1999 di Solo.
- Sutadjo, Sharif C. 2013. Membangun Kepemimpinan, Menyongsong Ekonomi Biru. *Antara* Selasa, 2 April 2013.